



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

BAPPEDA KABUPATEN BUOL

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah 2 Bab 1 - Pendahuluan Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);13.

- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda-Litbang Kabupaten Buol secara berkesinambungan

b. Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda-Litbang-Litbang Kabupaten Buol bertujuan :

- 1) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda-Litbang Kabupaten Buol tahun 2023.
- 2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda-Litbang Kabupaten Buol secara sistematis dan terorganisir.
- 3) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda-Litbang-Litbang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda-Litbang, proses penyusunan Renja Bappeda-Litbang, keterkaitan antara Renja Bappeda-Litbang dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda-Litbang.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda-Litbang, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda-Litbang Tahun 2021

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda-Litbang Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda-Litbang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Bappeda-Litbang Kabupaten Buol

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda-Litbang Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Pelaksanaan evaluasi merupakan fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda-Litbang Kabupaten Buol tahun 2021.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan daerah Penelitian Pengembangan Kabupaten Buol sampai dengan tahun 2021 serta target tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA-LITBANG DAN
PENCAPAIAN RESNTRA BAPPEDA-LITBANG s/d TAHUN 2026
KABUPATEN BUOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5		01								
5		01	01	Cakupan Pelayanan Perkantoran	100%	-				

5	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	100			
5	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	9 Dokumen	15 Dokumen	250
5	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	75
5	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	900
5	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			6 Dokumen	6 Dokumen	100			

5	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Org/Tahun	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	7 Dokumen	13 Dokumen	108,33
5	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi/keuangan SKPD	1 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	-	6 Dokumen	600
5	01	01	202	05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	-	6 Dokumen	600
5	01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			6 Dokumen	6 Dokumen	100			
5	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		-	-	-	6 Keg	6 Keg	600
5	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		14 Keg	14 Keg	100	6 Keg	20 Keg	2000

5	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100			
5	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	7 Kegiatan	58,33
5	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	7 Kegiatan	58,33
5	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	7 Kegiatan	58,33
5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			11 Unit	11 Unit	100			

5	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	22 Unit	2200
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%							
5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		7 Dok/Keg	7 Dok/Keg	100				
5	01	02	201	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	7 Dok/Keg	7 Dok/Keg	100	5 Dok/Keg	12 Dok/Keg	400	
5	01	02	201	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	7 Dok/Keg	7 Dok/Keg	100	5 Dok/Keg	12 Dok/Keg	70,59	
5	01	02	201	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	7 Dok/Keg	7 Dok/Keg	100	5 Dok/Keg	12 Dok/Keg	109,09	
5	01	02	201	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan	3 Dokumen	7 Dok/Keg	7 Dok/Keg	100	5 Dok/Keg	12 Dok/Keg	400	

5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%							
5	01	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3 Keg	3 Keg	100			
5	01	03	201	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD Bidang Pemerintahan	5 Dokumen		-	-	-	3 Keg	3 Keg	60
5	01	03	201	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen		-	-	-	-	-	

5	01	03	201	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	-	-	-	3 Keg	3 Keg	23,08
5	01	03	201	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	3 Keg	3 Keg	100	3 Keg	6 Keg	60
5	01	03	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		3 Keg	3 Keg	100			
5	01	03	202	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	-	-	-	-	-	

5	01	03	202	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan		3 Keg	3 Keg	100	-	-	
5	01	03	202	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		-	-	-	-	-	
5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3 Keg	3 Keg	100			
5	01	03	203	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen		-	-	-	-	-	

5	01	03	203	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	-	-	-	3 Dok/Keg	3 Dok/Keg
5	01	03	203	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Keg	3 Keg	100	-	-
5	01	03	203	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3 Keg	3 Keg	100	-	-
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		-	-			

5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	
5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		-	-				
5	05	02	203	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	-	-	-	1 Keg	1 Keg	100
5	05	02	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1 Buah	1 Buah	100			
5	05	02	204	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	2 Keg	200

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kabupaten Buol mempunyai tugas membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buol pada masa mendatang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol berikut ini disajikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten Buol;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama ini, BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol dihadapkan pada berbagai macam persoalan, antara lain: 1) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol perlu dilakukan kajian Kembali mengingat sumber data yang digunakan dalam penyusunan dokumen tersebut belum maksimal dikarenakan perbedaan sumber data yang diperoleh baik dari internal pemerintah daerah kabupaten buol maupun dari pihak eksternal; 2) sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum terakomodir dalam dokumen perencanaan,

hal ini disebabkan karena adanya expektasi masyarakat yang begitu besar terhadap proses perencanaan yang dilakukan selama ini, sementara disisi lain BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia; 3) evaluasi dan pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya karena laporan yang disampaikan tidak tepat waktu; 4) kegiatan pengkajian dan penelitian belum memberikan peran dalam perumusan dan pengambilan keputusan; 5) sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol serta mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol akan menempuh cara-cara sebagai berikut: 1) terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana pembangunan dan penelitian pengembangan; 2) memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain; 3) meningkatkan kualitas data dan analisis capaian indikator pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; 4) peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, dan percepatan pembangunan terpadu; 5) menjamin konsistensi perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 6) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Forum Musrenbang; dan 7) menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BUOL Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Buol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2		3	4	5	2	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	Kabupaten Buol				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	Kabupaten Buol				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Cakupan Pelayanan Perkantoran	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Cakupan Pelayanan Perkantoran	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,739,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,739,500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2,021,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2,021,600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,089,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,089,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Org/Tahun	3,976,997,425	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	574 Org/Tahun	3,976,997,425	

								Tunjangan ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi/keuangan SKPD	1 Dokumen	26.551.765,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verifikasi/keuangan SKPD	1 Dokumen	26.551.765,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.501.715,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.501.715,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.382.700,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.382.700,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan			

								Pengembangan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.381.375,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.381.375,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.345.430,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.345.430,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.591.375,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.591.375,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.654.125,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.654.125,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116,152,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	116,152,800	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,764,060,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,764,060,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,180,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,180,000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.771.860,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.771.860,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.101.634,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	370.101.634,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.788.750,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.788.750,00	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	7.952.900,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	7.952.900,00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	70.062.425,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	70.062.425,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	97.128.300,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	97.128.300,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan	3 Dokumen	241.996.205,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan	3 Dokumen	241.996.205,00

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen RKPD Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	49.999.400,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen RKPD Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	49.999.400,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	29.191.400,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	5 Dokumen	29.191.400,00	

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	46.375.070,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	46.375.070,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	12.990.620,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	12.990.620,00	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	90.634.120,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	90.634.120,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	23.793.850,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	23.793.850,00	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	74.370.650,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	74.370.650,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	29.267.150,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	29.267.150,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	22.568.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	22.568.000,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	39.161.750,00	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	39.161.750,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	34.476.650,00	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	34.476.650,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi			

	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	49.943.250,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	49.943.250,00	
--	--	--	---	-----------	---------------	--	--	---	-----------	---------------	--

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional di tahun 2023, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kabupaten Buol terus mendukung visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2026 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**. Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional , yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol sesuai dengan tugas dan fungsinya mengimplementasikan program prioritas kepastian hukum dan reformasi birokrasi, melalui urusan penunjang yang dilaksanakan yaitu: urusan perencanaan Pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan melalui program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buol.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja BAPPEDA-LITBANG Kabupten Buol didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
BAPPEDA-LITABANG Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedoman							
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7.621.536.279		7.945.205.576		13.259.850.730		23.931.666.910
URUSAN PERENCANAAN			7.497.942.924		7.821.623.926		11.682.805.730		18.354.621.910	
Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Partisipasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.412.299.699	100%	5.817.431.626	100%	8.045.036.010	100%	15.426.332.720
		Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100%	628.654.865	100%	1.505.783.165	100%	2.212.594.410	100%	1.470.381.835
		Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%	456.988.360	100%	498.409.135	100%	1.425.175.310	100%	1.457.907.355
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				123.593.355		123.581.650		1.577.045.000		5.577.045.000
Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	123.593.355	100%	123.581.650	100%	1.577.045.000	100%	5.577.045.000
		Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dok	49.943.650	1 Dok	49.943.250	1 Dok	1.142.345.000	1 Dok	3.142.345.000

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2023 akan melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 4 program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II senilai Rp **7.621.536.279** Program dan kegiatan tersebut merupakan hasil penelaahan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (Teknokratis). Rincian program dan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN BUOL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023. (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kabupaten Buol							
5	01													
5	01	01				Cakupan Pelayanan Perkantoran		100%						

5	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja yang tersusun					
5	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,739,500	DAU	100%	7,739,500
5	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2,021,600	DAU	100%	2,021,600
5	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,089,500	DAU	100%	6,089,500
5	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					

5	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Org/Tahun	3,976,997,425			100%	3,976,997,425
5	01	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengajuan verivikasi/keuangan SKPD	1 Dokumen	26.551.765,00			100%	26.551.765,00
5	01	01	202	05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.501.715,00			100%	9.501.715,00
5	01	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.382.700,00	-	-	100%	1.382.700,00
5	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						
5	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.381.375,00	-		100%	5.381.375,00
5	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.345.430,00			100%	5.345.430,00

5	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

12 Laporan	5,180,000					100%	5,180,000			
12 Laporan	70.771.860,00					100%	70.771.860,00			
12 Laporan	370.101.634,00					100%	370.101.634,00			

5	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.788.750,00			100%	24.788.750,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah						
5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah						
5	01	02	201	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	7.952.900,00			100%	7.952.900,00
5	01	02	201	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	70.062.425,00			100%	70.062.425,00
5	01	02	201	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	11 Berita Acara	97.128.300,00			100%	97.128.300,00

5	01	02	201	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan	3 Dokumen	241.996.205,00			100%	241.996.205,00
5	01	02	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah						
5	01	02	202	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat desa yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	57 Orang	12.114.800,00			100%	12.114.800,00
5	01	02	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
5	01	02	203	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Dokumen	191.400.635,00			100%	191.400.635,00

5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan						
5	01	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
5	01	03	201	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	49.999.400,00	-		100%	49.999.400,00
5	01	03	201	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	29.191.400,00	-		100%	29.191.400,00

5	01	03	201	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	48.596.300,00	-		100%	48.596.300,00
5	01	03	201	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	29.201.650,00			100%	29.201.650,00
5	01	03	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)						

5	01	03	202	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	46.375.070,00	-	-	100%	46.375.070,00
5	01	03	202	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	12.990.620,00	-	-	100%	12.990.620,00
5	01	03	202	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	90.634.120,00	-	-	100%	90.634.120,00
5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						

5	01	03	203	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	23.793.850,00	-	100%	23.793.850,00
5	01	03	203	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	74.370.650,00		100%	74.370.650,00
5	01	03	203	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	29.267.150,00		100%	29.267.150,00
5	01	03	203	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	22.568.000,00	-	100%	22.568.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						

5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	02	203	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1 Dokumen	39.161.750,00		-	100%	39.161.750,00	
1 Dokumen	34.476.650,00			100%	34.476.650,00	

5	05	02	204	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	49.943.250,00			100%	49.943.250,00
---	----	----	-----	----	--	---	-----------	---------------	--	--	------	---------------

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol 2023-2026 dan untuk mengimplementasikan rencana tahunan pada Rencana Strategis BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dengan alokasi anggaran pada program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan BAPPEDA-LITBANG
Tahun Anggaran 2023

Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	7.621.536.279	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.412.299.699	APBD II
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.850.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	7.739.500	
Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.021.600	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.089.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.014.421.750	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.976.996.820	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	26.540.515	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.501.715	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1.382.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.125.105	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.381.375	
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	
penyediaan peralatan rumah tangga	5.345.430	
Penyediaan bahan logistik kantor	13.591.375	
penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6.654.125	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.152.800	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.764.060.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.764.060.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.053.494	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.180.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.771.860	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.101.634	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.788.750	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.788.750	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	628.654.865	APBD II
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	425.139.430	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	7.952.500	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	78.062.425	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	97.128.300	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	241.996.205	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12.114.800	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12.114.800	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	191.400.635	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	191.400.635	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	149.999.800	APBD II
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	149.999.800	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.164.650	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	29.267.150	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.568.000	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	149.999.810	APBD II
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	149.999.810	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.375.070	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	12.990.620	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.634.120	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	156.988.750	APBD II
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156.988.750	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	49.999.400	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.722.500	
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan manusia	14.264.750	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	74.002.100	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	123.593.355	APBD II

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	123.593.355	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	39.172.950	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	34.476.755	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	49.943.650	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan agenda kerja pada Tahun 2023. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Buol secara umum dan BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol secara khusus maka Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

Substansi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1) substansi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 disusun terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023 dan Rencana Strategis BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023-2026; 2) tindak lanjut alokasi anggaran BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan; 3) bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol, agar segera menyusun rencana kinerja masing-

masing dengan mengacu pada Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023 yang telah ditetapkan; dan 4) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Buol Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.